

LAPORAN AKHIR PENELITIAN



ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KEBIJAKAN PENINGKATANNYA DI PROVINSI JAMBI

Oleh:

Deby Aisyah Rj Nur, SE., MM NIDN 1019128902

Dr. Faradilla Herlin, SE., M.Si NIDN 1015038501

Dr. Susraria Yuvanda, SP., ME NIDN 1001077601

Dibiayai oleh:

Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2022/2023

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAMBI
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

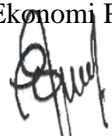
1. Judul Penelitian : Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dan Kebijakan Peningkatannya Di Provinsi Jambi
2. Tim Penelitian
 - a) Ketua Tim Peneliti
 - a. Nama : Deby Aisyah RJ Nur
 - b. NIDN : 1019128902
 - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
 - b) Anggota Peneliti
 - a. Nama : DR. Faradilla Herlin, SE., M.Si
 - b. NIDN : 1015038501
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
 - c) Anggota Peneliti
 - a. Nama : DR. Sesarria Yuvanda, SP., ME
 - b. NIDN : 1001077601
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
3. Lokasi Kegiatan : Provinsi Jambi
4. Lama Penelitian : 7 Bulan
5. Biaya Total Penelitian : 2.500.000,-
 - Dana Internal : 1.500.000,-
 - Dana Eksternal : 1.000.000,-


Mengetahui,

Jambi, 31 Desember 2022

Ka. Prodi Ekonomi Pembangunan,

Peneliti


(Ratih Rosita, SE, MSi)
NIDN. 1011118603


(Deby Aisyah RJ Nur, SE. MM)
NIDN. 1019128902

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi

(Prima Audia Daniel, SE., ME.)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah, maka dalam kemandirian daerah dalam pembiayaan keuangan daerah sangat di perlukan. Daerah yang memiliki sumber pembiayaan sendiri, yang berasal dari PAD akan lebih otonom dan dapat mempercepat pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan kemandirian keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Disamping ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan yang berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dana otsus dan dana daerah istimewa.

Untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah maka potensi PAD harus dioptimalkan, agar kontribusi PAD terhadap keuangan daerah meningkat. Potensi PAD dapat bersumber dari pajak dan retribusi daerah, laba BUMD, dan hasil pengelolaan aset daerah lainnya. Untuk itu potensi instrument PAD tersebut harus digali dan ditargetkan menjadi sumber PAD yang mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Provinsi Jambi merupakan daerah otonom yang punya kewajiban meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah, terutama pembangunan infrastruktur daerah. Selama tahun 2010 hingga tahun 2017 tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jambi rata – rata adalah kategori sedang, dengan nilai rasio rata-rata sebesar 64,18%. Ini berarti Provinsi Jambi mampu membiayai lebih dari separuh total pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan Hanya sekitar 35% saja yang dibiayai oleh dana dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan jika Provinsi Jambi tidak terlalu bergantung banyak dari APBN, namun masih tetap memerlukan bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai sepenuhnya pembiayaan anggaran daerah.

Guna untuk menelaah dan mengkaji lebih dalam tentang Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jambi, maka diperlukan kajian yang lebih rinci terhadap

faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Disamping itu perlu juga dirumuskan kebijakan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Apa saja kebijakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Untuk merumuskan kebijakan yang dapat peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Sebagai referensi bagi peneliti maupun akademisi, dalam memperkaya wacana tentang keuangan daerah khususnya tentang Kemandirian Keuangan Daerah beserta kebijakan peningkatannya.

2. Manfaat Praktisi

Sebagai masukan bagi pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dalam merumuskan kebijakan peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jambi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Keuangan Daerah

Seiring dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah mulai tahun 2004.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4).

Hak, wewenang dan kewajiban daerah di atas ini terkait dengan pendapatan dan pengeluaran daerah yang di sebut dengan keuangan daerah. Menurut Kuswandi (2016), Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kuswandi, Aos. (2016).

Sedangkan Menurut Mamesah dalam Halim (2007), yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Mamesah, D. J. 1995.

Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel. Oleh karena itu diaturlah hak dan kewajiban daerah terkait keuangan daerah dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Pasal 21. Diantaranya pengelolaan kekayaan daerah, pemungutan pajak dan retribusi daerah, bagi hasil dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

2.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Abdul Halim, 2007).

Untuk mengukur Kemandirian Keuangan Daerah, digunakanlah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, maka semakin kecil tingkat ketergantungannya terhadap sumber eksternal. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, berarti semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diukur dengan Rumus Berikut ini :
(Halim, 2014)

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{DP}} \times 100\%$$

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Dana Perimbangan

2.1.3 Potensi Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari 2 jenis, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber eksternal ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari

sumber-sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga.

Sedangkan sumber internal adalah pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Sumber internal meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil-hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (Mohammad Riduansyah, 2003).

Kemandirian Keuangan Daerah sangat dipengaruhi oleh sumber keuangan internal, oleh karena itu untuk pemerintah daerah perlu memberi perhatian lebih untuk dapat menggali lebih dalam terhadap potensi pendapatan daerah dari sumber internal ini. Beberapa sumber internal yang memiliki potensi diantaranya sebagai berikut :

1. Pajak daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah yang telah diperbaharui oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah adalah sbb :

- (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas :
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
- (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;

- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

2. Retribusi daerah

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Pedzinan Tertentu.

3. Badan Usaha Milik Daerah

BUMD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah, seperti kondisi geografis daerah meliputi kekayaan alam daerah, iklim, demografi, pengeluaran daerah itu sendiri, PDRB, investor, pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, dan pinjaman.

2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun/judul	Hasil Penelitian
1.	Stannia Cahaya Suci dan Alla Asmara / 2014 / Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio Dana Perimbangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
2.	Royda dan Dwi Riana / 2019/ Analisis Kemandirian dan	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

	Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata sangat rendah masih disekitar 0%-25%, sedangkan untuk rasio kemandirian keuangan daerah juga tergolong masih kurang yaitu rataa-rata berada di antara 0%-10%. Kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomisedangkan kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi sumater selatan
3.	Fahriansyah Syam / 2022 / Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Berdasarkan hasil analisis, pemerintah daerah perlu mengeluarkan upaya strategis dengan melakukan pemberdayaan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2.3. Karangka Pikir

Kemandirian Keuangan Daerah merupakan rasio yang memperlihatkan perbandingan antara total PAD yang diterima pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio tersebut memperlihatkan kemampuan daerah secara mandiri untuk membiayai total belanja daerah untuk membangun daerahnya.

Untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah maka banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor tersebut berasal dari kondisi makro ekonomi berupa variabel PDRB dan Investasi. Sedangkan dari sisi keuangan juga turut mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah seperti pajak daerah dan dana perimbangan.

PDRB merupakan nilai produksi yang dimiliki pemerintah daerah dan berasal dari 17 sektor. PDRB tersebut dapat mendorong peningkatan keuangan daerah melalui nilai produksi yang terjadi yang akan dikenakan biaya berupa pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Ini berarti peningkatan PDRB berpengaruh kepada peningkatan keuangan daerah.

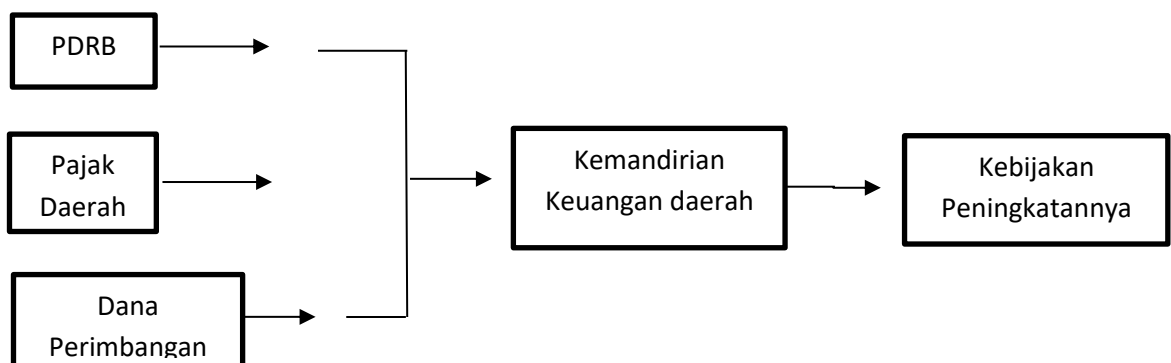
Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar terhadap PAD. Ini berarti pajak merupakan andalan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, sedangkan besaran PAD menentukan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Dana perimbangan penyumbang terbesar dalam pembiayaan daerah. Dana perimbangan berasal dari transfer pemerintah pusat ke daerah, semakin besar dana perimbangan, maka semakin kecil tingkat kemandirian.

Guna meningkatkan kemandirian daerah maka diperlukan kebijakan yang tepat yang menghasilkan program yang unggul bagi peningkatan PAD agar kemandirian keuangan meningkat. Kebijakan dan program tersebut harus didalami dan dianalisis lebih tajam agar menghasilkan kebijakan dan program yang dapat menstimulan meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.

Dari uraian diatas maka kerangka pemikirannya adalah seperti yang gambar di bawah ini :

Gambar 3.1. Skema Kerangka Pikir



BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi instansi terkait. Yang dimaksud dengan analisis data sekunder adalah analisis terhadap data yang telah di laporkan oleh suatu badan, organisasi dimana badan atau organisasi itu sendiri tidak langsung mengumpulkan, melainkan diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkan terlebih dahulu dan menerbitkannya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu (*time series*) selama tahun 2010 sampai tahun 2017, yang meliputi data :

1. PDRB Provinsi Jambi.
2. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.
3. Dana Perimbangan Provinsi Jambi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari instansi pemerintah yang telah terdokumentasi, yaitu:

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

3.3. Model Analisis Data

3.3.1 Model Analisis Pertama

Untuk menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu determinasi Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jambi periode dengan menggunakan semi logaritma dan alat analisis regresi linear berganda. Dimana dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan (DP) sebagai variabel variabel bebas, akan dianalisis pengaruhnya terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) sebagai variabel variabel terikat.

Model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dengan formula sebagai berikut :

$$Y = a + bX_1 + cX_2 + dX_3 + e$$

Keterangan:

Y = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
a, b, c, d = Konstanta
X₁ = PDRB
X₂ = PAD
X₃ = Dana Perimbangan (DP)
e = Standar error

B.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dengan menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*) dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut tidak mengandung multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independent, variabel dependent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan Uji *Jarque-Bera*. Pengujian normalitas dilakukan dengan *Jarque-Bera test*. Uji *Jarque-Bera* mempunyai nilai *chi square* dengan derajat bebas dua. Jika hasil uji *Jarque-Bera* lebih besar dari nilai *chi square* pada $\alpha = 5\%$, maka hipotesis nol diterima yang berarti data berdistribusi normal. Jika hasil uji *Jarque-Bera* lebih kecil dari nilai *chi square* pada $\alpha = 5\%$, maka hipotesis nol ditolak yang artinya tidak terdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu gejala dimana terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka variabel ini tidak ortogonal yang artinya variabel independen memiliki nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinearitas atau tidak di dalam model, dapat dilihat apakah *R-Squared* yang dihasilkan oleh estimasi tinggi, akan tetapi secara individu variabel independen banyak yang tidak signifikan.

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model adalah dengan melihat matriks koefisien korelasi. Jika terdapat variabel yang memiliki nilai korelasi mendekati 1, maka model teridentifikasi multikolinearitas sempurna, sedangkan jika tidak terjadi multikolinearitas sempurna, maka model bisa digunakan untuk estimasi.

Cara untuk mendeteksi terhadap multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan seperti R^2 yang tinggi dan Uji F yang signifikan, tetapi banyak koefisien regresi dalam Uji t yang tidak signifikan.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi (serial korelasi) adalah korelasi yang terjadi di antara anggota observasi yang berdekatan. Bila asumsi ini tidak dipenuhi maka estimator OLS (*Ordinary Least Square*) tidak lagi efisien. Karena selang keyakinan akan semakin lebar, berarti uji t dan uji F menjadi tidak valid dan kurang kuat. Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data *time series*) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data *time series* walaupun dapat juga terjadi pada data *cross section*. Dalam data *time series*, observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antar dua observasi sangat pendek.

Adapun cara mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilihat dengan menggunakan uji statistik Durbin Watson. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test).

Tabel 3.1: Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif / negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Imam Ghozali, 2006

d. Uji Heterskedastisitas

Suatu asumsi pokok dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama.

Salah satu cara mengatasi masalah heteroskedastisitas adalah dengan melakukan transformasional log. Karena transformasional log linier akan mengurangi situasi heteroskedastisitas, dalam hal ini transformasional log akan memperkecil skala ukuran variabel. Untuk menguji tidak terjadinya heterosdastisitas dilakukan dengan melakukan uji park. *Rule of thumb* yang digunakan adalah bila nilai $t\text{-hitung} > t\text{-probalitas}$ ($p\text{ value}$), berarti terjadi heterosdastisitas namun sebaliknya apabila nilai $t\text{-hitung} < t\text{-probalitas}$ ($p\text{ value}$) maka akan terjadi heteroskedastisitas.

B.2 Uji Hipotesis

Uji hipotesis secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik t , nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2006)

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut : H_0 ditolak H_1 diterima apabila $t\text{ hitung} > t$

tabel, yang berarti variabel independennya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serempak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independent. Nilai koefisien

determinasi diantara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independent sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh prediksi variasi model dependent. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

3.3.2 Model Analisis Kedua

Untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua, yaitu merumuskan kebijakan pendekatan Kemandirian Keuangan Daerah, maka digunakan model analisis Indeks Kebijakan. Model ini melakukan pendalaman terhadap hasil signifikansi regresi berganda yang akan dituangkan kedalam kebijakan prioritas dan lebih lanjut akan dijabarkan kedalam program utama. Oleh karena itu indeks ini mendalami kembali hasil signifikansi regresi yang pada akhirnya berujung kepada perumusan kebijakan dan program untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Guna memudahkan melakukan pendalaman yang diikuti oleh perumusan kebijakan dan program yang berbasis kepada hasil signifikansi regresi berganda, maka digunakan tabel bantu berikut ini :

**Tabel Bantu
Indeks Kebijakan**

No	Hasil Signifikansi Regresi Berganda	Skala Prioritas	Kebijakan Prioritas	Program Utama
1.	Probabilitas Sangat sangat kecil	P.I	KP.I	PU.I
2	Probabilitas Sangat Kecil	P.II	KP.II	PU.II
3.	Probabilitas Kecil	P.III	KP.III	PU.III

3.4 Operasional Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah serta diperoleh melalui rasio besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah. Sehingga satuan rasio kemandirian diukur dalam persen.
2. PDRB adalah seluruh total sektor ekonomi di wilayah Provinsi Jambi dalam satu tahun yang dihitung dalam rupiah.
3. Pajak Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari Instrumen Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi berupa pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak tembakau, pajak air permukaan.
4. Dana Perimbangan (DP) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang dikumpulkan dalam satu tahun dan dihitung dalam juta rupiah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 PEMBAHASAN

Ada sebanyak 4 variabel dalam penelitian ini, yaitu : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). Data yang digunakan dalam setiap variable penelitian ini adalah data *time-series* dari tahun 2010 - 2017 sebagaimana berikut ini:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

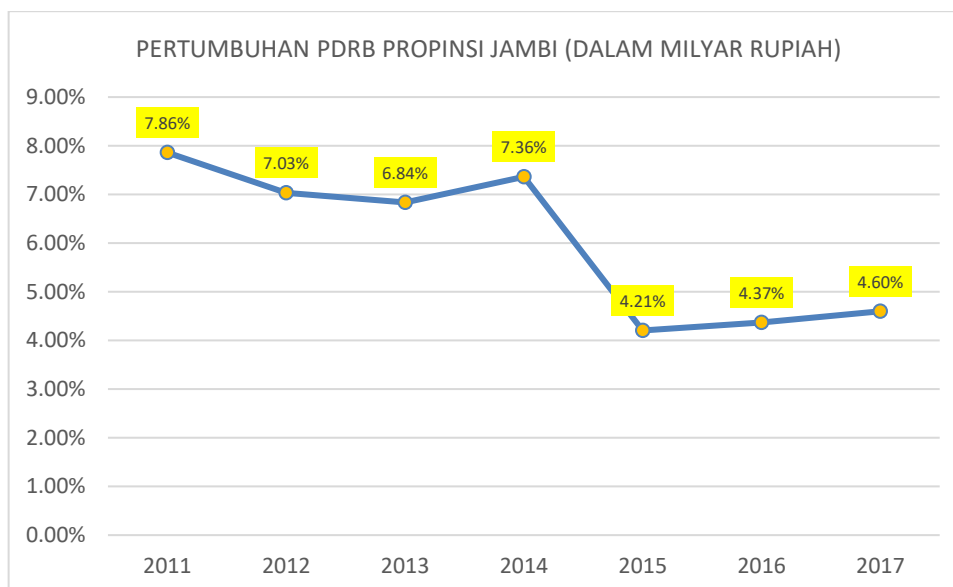
Menurut Arsyad (1992) PDRB adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah atau regional. Berikut adalah data PDRB Provinsi Jambi dari tahun 2010 – 2017 :

Tabel 4.1
PDRB Provinsi Jambi
Tahun 2010-2017

NO.	SEKTOR PDRB	PDRB ADHK MENURUT LAPANGAN USAHA PROVINSI JAMBI (DALAM MILYAR RUPIAH)							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.627,24	24.744,88	26.429,05	28.070,96	31.145,43	32.846,19	34.933,69	36.809,09
B.	Pertambangan dan Penggalian	24.255,28	27.265,31	28.595,77	29.692,33	30.951,99	30.879,90	31.016,89	32.207,04
C.	Industri Pengolahan	10.357,58	11.217,09	12.023,51	13.005,65	13.630,73	13.948,63	14.267,74	14.640,67
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	38,39	43,50	47,71	51,87	59,83	64,30	68,27	69,42
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	144,97	152,53	153,78	156,65	163,47	170,15	178,69	183,33
F.	Konstruksi	5.325,47	5.619,31	6.575,81	7.857,46	8.558,42	8.843,60	9.156,96	9.818,05
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.677,68	8.317,95	9.054,75	9.799,18	10.661,96	11.762,59	12.579,06	13.123,44
H.	Transportasi dan Pergudangan	2.740,91	2.900,04	3.144,31	3.391,94	3.669,44	3.911,18	4.235,23	4.488,55
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	848,32	901,25	970,92	1.033,11	1.226,62	1.306,24	1.406,11	1.517,93
J.	Informasi dan Komunikasi	2.951,17	3.167,30	3.400,44	3.622,36	3.876,30	4.257,48	4.619,68	4.924,70
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.787,94	2.159,69	2.375,17	2.655,76	2.757,73	2.815,83	3.108,02	3.203,10
L.	Real Estate	1.441,99	1.529,29	1.615,84	1.695,50	1.732,80	1.805,35	1.883,13	1.969,92
M. N.	Jasa Perusahaan	1.085,72	1.101,92	1.148,39	1.171,84	1.230,41	1.308,19	1.376,80	1.436,30
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.226,20	3.359,84	3.493,02	3.652,56	4.141,16	4.422,40	4.555,65	4.670,56
P.	Jasa Pendidikan	3.225,94	3.305,88	3.515,48	3.705,01	3.752,60	4.033,38	4.277,11	4.458,49
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	903,91	938,22	1.020,57	1.102,95	1.270,48	1.398,14	1.490,99	1.572,87
R. S. T. U.	Jasa lainnya	979,70	1.016,89	1.050,55	1.100,99	1.162,08	1.263,84	1.347,12	1.408,25
	JUMLAH	90.618,41	97.740,87	104.615,08	111.766,13	119.991,44	125.037,40	130.501,13	136.501,71
	Σ	7.122,46	6.874,21	7.151,05	8.225,31	5.045,96	5.463,73	6.000,58	
	%		7,86%	7,03%	6,84%	7,36%	4,21%	4,37%	4,60%

Sumber : [BPS Propinsi Jambi - PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi](#)

Grafik 4.1
Grafik Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi



Sumber : [BPS Propinsi Jambi - PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi](#)

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya dapat dinilai dari besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Soebagyo, 2007:179). Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 jumlah PDRB pada Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlah PDRB adalah sebesar 90.618,41 milyar rupiah yang dating dari berbagai sektor usaha. Dan pada tahun 2017 jumlah PDRB adalah sebesar 136.501,71, meningkat dengan jumlah akumulasi sebesar 45.883,30 milyar rupiah dari jumlah di tahun 2010.

Namun meskipun jumlahnya mengalami kenaikan, pertumbuhannya mengalami fluktuasi sebagaimana yang tertera pada gambar 4.1. Pertumbuhan paling tinggi berada di tahun 2011 yaitu tumbuh sebesar 7,86% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2015 merupakan tahun dengan pertumbuhan PDRB yang paling rendah yaitu tumbuh sebesar 4,21% dari tahun 2014.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

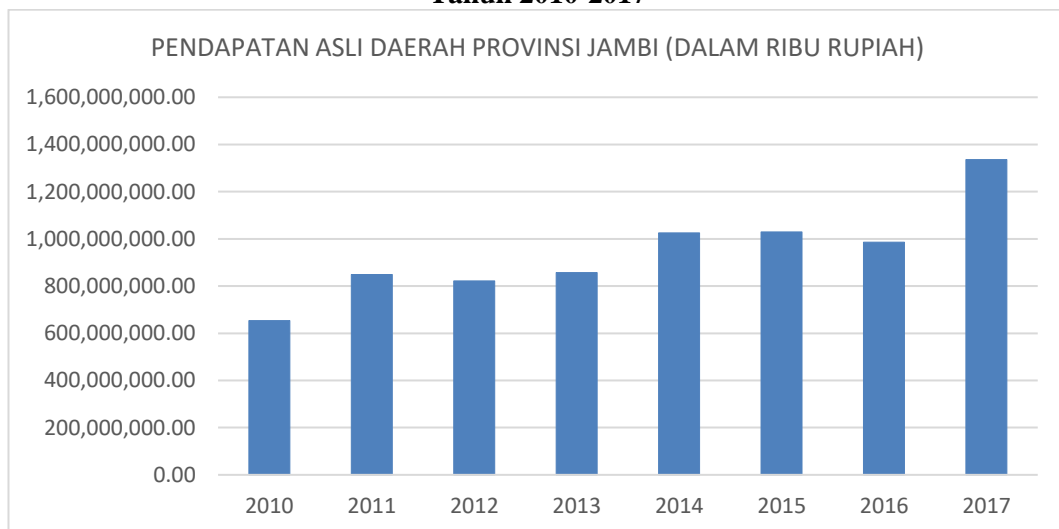
Menurut Abdul Halim (2007:96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dalam penelitian ini, yang menjadi PAD Provinsi Jambi adalah penerimaan pada pos Pajak Daerah dan pos Retribusi Daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi
Tahun 2010-2017

NO.	SUMBER PENDAPATAN	PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAMBI (DALAM RIBU RUPIAH)							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Pos Pajak Daerah	602,355,302.09	838,851,529.20	808,258,511.16	841,884,751.20	1,010,560,582.18	1,010,318,979.97	966,519,347.10	1,316,162,467.49
B.	Pos Retribusi Daerah	51,635,983.79	10,183,535.64	13,402,905.83	15,363,758.64	14,587,180.55	19,336,652.88	19,321,610.36	19,864,952.01
	JUMLAH	653,991,285.88	849,035,064.84	821,661,416.99	857,248,509.84	1,025,147,762.73	1,029,655,632.85	985,840,957.46	1,336,027,419.49

Sumber : [BPS Provinsi Jambi - Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi](#)

Grafik 4.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi
Tahun 2010-2017



Dari grafik 4.2 diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2017 jumlah PAD Provinsi Jambi cenderung mengalami peningkatan meskipun dalam kondisi fluktuatif. Jumlah PAD tahun 2017 meningkat dua kali lipat dari jumlah PAD tahun 2010. Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi PAD maka akan meningkatkan kemandirian daerah.

3. Dana Perimbangan (DP)

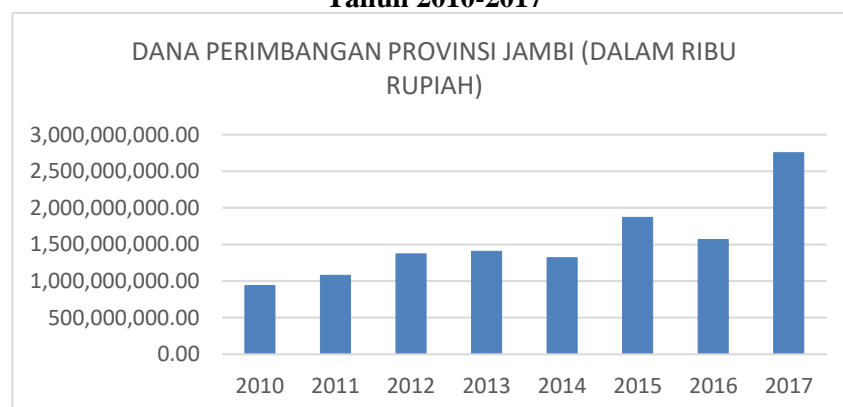
Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2009:129). Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat ini disalurkan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Jumlah Dana Perimbangan untuk Provinsi Jambi dari tahun 2010-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Dana Perimbangan (DP) Provinsi Jambi
Tahun 2010-2017

Tahun	DBH	DAU	DAK	JUMLAH
2010	429,853,791.90	489,069,421.00	20,030,000.00	938,953,212.90
2011	470,364,817.07	583,882,413.00	24,735,600.00	1,078,982,830.07
2012	606,725,048.67	731,952,242.00	32,673,320.00	1,371,350,610.67
2013	516,989,510.38	836,578,062.00	51,035,790.00	1,404,603,362.38
2014	517,146,656.07	753,984,939.00	49,355,510.00	1,320,487,105.07
2015	351,969,164.36	1,009,165,864.00	508,411,653.00	1,869,546,681.36
2016	416,203,384.64	1,070,452,478.00	80,040,542.46	1,566,696,405.09
2017	418,999,234.03	1,397,912,161.00	934,827,673.24	2,751,739,068.27

Sumber : [DJPK Kemenkeu - Dana Perimbangan Provinsi Jambi 2002-2018](#)

Grafik 4.3
Dana Perimbangan (DP) Provinsi Jambi
Tahun 2010-2017



Dari grafik 4.3 diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2017 jumlah Dana Perimbangan Provinsi Jambi juga cenderung mengalami peningkatan meskipun dalam kondisi fluktuatif. Jumlah Dana Perimbangan tahun 2017 meningkat tiga kali lipat dari jumlah PAD tahun 2010. Fafurida & Pratiwi (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan tingkat kemandirian keuangan dari pemerintah daerah.

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Menurut Mahmudi (2010:142), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Dana Perimbangan).

Semakin tinggi RKKD, maka Pemerintah Daerah semakin mampu untuk mengelola keuangan sendiri tanpa bantuan Pemerintah Pusat maupun dari pihak lain. RKKD yang tinggi juga dapat diartikan sebagai bentuk tingginya keberhasilan pemerintah dalam memungut Pajak dan Retribusi Daerah disertai dengan tingginya partisipasi masyarakat membayar Pajak dan Retribusi Daerah tersebut

Tabel 4.4
Klasifikasi Kemandirian Keuangan Daerah

RKKD	Klasifikasi
0% - 25%	Rendah Sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690/900/327 tahun 1996.

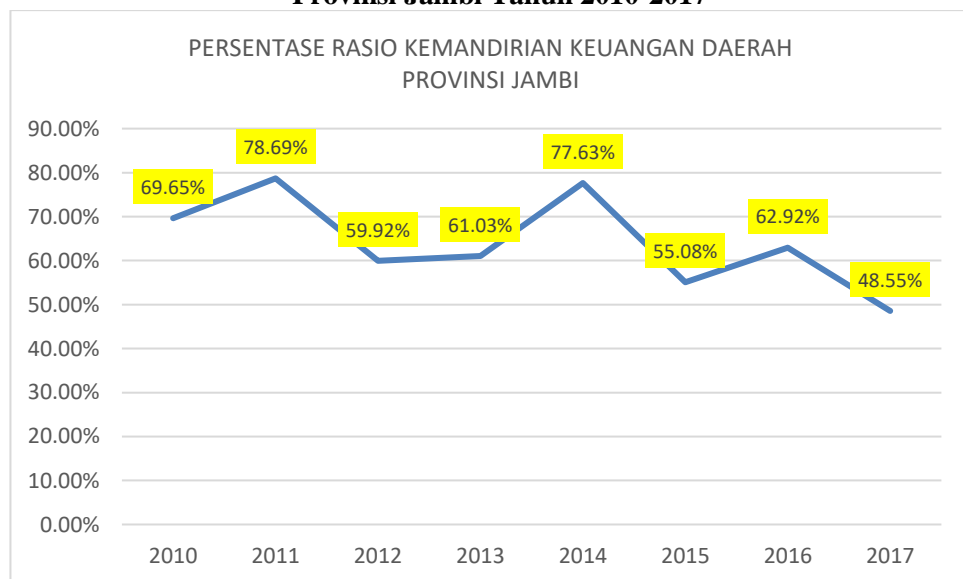
Berikut adalah RKKD untuk Provinsi Jambi dari tahun 2010-2017:

Tabel 4.5
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Provinsi Jambi
Tahun 2010-2017

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (X2) (DALAM RIBU RUPIAH)	DANA PERIMBANGAN (X3) (DALAM RIBU RUPIAH)	RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Y)
2010	653,991,285.88	938,953,212.90	69.65%
2011	849,035,064.84	1,078,982,830.07	78.69%
2012	821,661,416.99	1,371,350,610.67	59.92%
2013	857,248,509.84	1,404,603,362.38	61.03%
2014	1,025,147,762.73	1,320,487,105.07	77.63%
2015	1,029,655,632.85	1,869,546,681.36	55.08%
2016	985,840,957.46	1,566,696,405.09	62.92%
2017	1,336,027,419.49	2,751,739,068.27	48.55%

Sumber : Data Olahan

Grafik 4.4
Pertumbuhan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Provinsi Jambi Tahun 2010-2017



Sumber : Data Olahan

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2017 Rasio Kemandirian Keuangan (RKKD) Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan secara fluktuatif. RKKD Provinsi Jambi tahun 2017 menunjukkan angka

dibawah 50%, artinya Provinsi Jambi masih berada dalam kategori “Rendah” dalam Kemandirian Keuangan Daerah, karena lebih dari separuh pendapatan Pemerintah Daerah masih berasal dari Pemerintah Pusat. Fafurida & Pratiwi (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan tingkat kemandirian keuangan dari pemerintah daerah.

4.2 HASIL PENELITIAN

A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov menilai data berdistribusi normal jika nilai $\text{Sig.} > \alpha$ (Suliyanto, 2011). Nilai α untuk signifikansi pada penelitian ini adalah 0,05.

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Program SPSS 22 dan didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00398641
Most Extreme Differences	Absolute	.170
	Positive	.170
	Negative	-.123
Test Statistic		.170
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,200 yang artinya nilai tersebut $> 0,05$. Oleh karena itu data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas

1. Uji Multikolinearitas Sebelum Transformasi Data

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan regresi terdapat korelasi diantara variabel bebas. Hasil uji multikolinieritas dapat ditentukan dengan cara melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dari setiap variabel bebas. Jika nilai $VIF < 10,00$, maka data dalam penelitian tidak terdapat gejala multikolinieritas (Suliyanto, 2011:90).

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan Program SPSS 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.732	.071		10.320	.000		
PDRB	-3.677E-6	.000	-.562	-3.340	.029	.189	5.288
PAD	9.738E-10	.000	1.852	7.732	.002	.093	10.736
DP	-3.819E-10	.000	-2.039	-10.852	.000	.151	6.608

a. Dependent Variable: RKKD

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk masing-masing PDRB, PAD dan DP adalah 5,288, 10,736 dan 6,608. Itu artinya hanya nilai DP yang berada diatas 10 dan terdapat gejala multikolinearitas. Oleh karena itu peneliti melakukan transformasi data untuk mengatasi gejala multikolinearitas ini.

2. Uji Multikolinearitas Setelah Transformasi Data

Data dalam penelitian ini memiliki perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebasnya, untuk itu persamaan regresinya harus dibuat kedalam model Logaritma Natural (Ghozali, 2007:89). Transformasi data dilakukan pada variable X_2 yaitu PAD dan X_3 (Dana Perimbangan).

Hasil uji multikolinearitas setelah transformasi data penelitian ini menggunakan Program SPSS 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas Setelah Transformasi Data

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.018	.466		-2.185	.094		
	PDRB	-9.838E-7	.000	-.150	-2.969	.041	.138	7.255
	Ln_PAD	.749	.028	1.482	26.746	.000	.115	8.696
	Ln_DP	-.648	.015	-2.027	-42.453	.000	.155	6.456

a. Dependent Variable: RKKD

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk masing-masing PDRB, Ln PAD dan Ln DP adalah 7,255, 8,696 dan 6,456. Itu artinya nilai VIF masing-masing variable < 10 atau sudah tidak memiliki gejala multikolinearitas.

C. Uji Autokorelasi Setelah Transformasi Data

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Sujarweni (2008) mengatakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Jika angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
- Jika DW diatas +2 berarti ada autokorelasi positif.

Hasil uji autokorelasi setelah transformasi data dalam penelitian ini menggunakan Program SPSS 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi Data

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.999 ^a	.999	.998	.00527	.999	943.019	3	4	.000	1.156

a. Predictors: (Constant), Ln_DP, PDRB, Ln_PAD

b. Dependent Variable: RKKD

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,156, angka tersebut berada diantara -2 sampai dengan +2, artinya tidak terdapat gejala autokorelasi dalam penelitian ini.

D. Uji Heteroskedastisitas Setelah Transformasi Data

Menurut Ghozali (2018:120) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- Jika nilai Sig. value $\geq 0,05$ maka artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
- Jika nilai Sig. value $\leq 0,05$ maka artinya terdapat masalah heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas setelah transformasi data dalam penelitian ini menggunakan Program SPSS 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas Setelah Transformasi Data

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.026	.219		.121	.910		
	PDRB	-.7358E-8	.000	-.549	-.472	.661	.138	7.255
	Ln_PAD	-.004	.013	-.388	-.305	.776	.115	8.696
	Ln_DP	.003	.007	.497	.453	.674	.155	6.456

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa nilai Sig. Value untuk masing-masing variable PDRB, Ln PAD dan Ln DP adalah 0,661, 0,776 dan 0,674. Ketiga angka tersebut berada diatas 0,05 dan bermakna tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

E. Analisis Regresi Berganda Data Time Series

1. Uji-t Setelah Transformasi Data

Uji-t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independen secara individual dalam menerangkan variabel

dependen (Ghozali, 2018:99). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- c. Jika nilai Sig. value $> 0,05$ maka artinya variable tersebut tidak berpengaruh secara signifikan.
- d. Jika nilai Sig. value $< 0,05$ maka artinya variable tersebut berpengaruh secara signifikan.

Hasil uji-t setelah transformasi data dalam penelitian ini menggunakan Program SPSS 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji-t Setelah Transformasi Data

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.018	.466		-2.185	.094		
	PDRB	-9.838E-7	.000	-.150	-2.969	.041	.138	7.255
	Ln_PAD	.749	.028	1.482	26.746	.000	.115	8.696
	Ln_DP	-.648	.015	-2.027	-42.453	.000	.155	6.456

a. Dependent Variable: RKKD

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa nilai Sig. Value untuk masing-masing variable PDRB, Ln PAD dan Ln DP adalah 0,041, 0,000 dan 0,000. Ketiga angka tersebut berada dibawah 0,05 dan artinya ketiga variable tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variable RKKD.

2. Uji F Setelah Transformasi Data

Untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, maka digunakanlah uji F-statistik (Sujarweni, 2015, p. 228). Dasar pengambilan keputusan dalam Uji F adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Sig. $< 0,05$ artinya semua variable bebas secara bersamaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variable terikat.
- b. Jika nilai Sig. $> 0,05$ artinya semua variable bebas secara bersamaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variable terikat.

Hasil Uji F dalam penelitian ini setelah transformasi data adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji-t Setelah Transformasi Data

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.079	3	.026	943.019	.000 ^b
	Residual	.000	4	.000		
	Total	.079	7			

a. Dependent Variable: RKKD

b. Predictors: (Constant), Ln_DP, PDRB, Ln_PAD

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa nilai Sig. adalah sebesar 0,000, angka tersebut berada di bawah 0,05, artinya bahwa ketiga variable memiliki pengaruh yang signifikan secara bersamaan terhadap variabel terikatnya.

3. Analisis Regresi Berganda (Data Time Series)

Tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) dengan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linier (Sujarweni, 2015, p. 227). Dalam penelitian ini persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX_1 + cX_2 + dX_3 + e$$

Keterangan:

Y = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

a, b, c, d = Konstanta/Koefisien

X₁ = PDRB

X₂ = PAD

X₃ = Dana Perimbangan (DP)

e = Standar error

Dari hasil pengujian analisis regresi berganda didapatkan hasil sebagai berikut ini :

Tabel 4.13
Hasil Analisis Regresi Berganda Setelah Transformasi Data

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.018	.466	-2.185	.094		
	PDRB	-9.838E-7	.000	-.150	-.2.969	.041	.138
	Ln_PAD	.749	.028	1.482	26.746	.000	.115
	Ln_DP	-.648	.015	-2.027	-42.453	.000	.155

a. Dependent Variable: RKKD

Dari tabel 4.13 diatas maka dapat dibuat persamaannya adalah sebagai berikut ini :

$$\text{RKKD} = -1,018 - 9,838 \text{ PDRB} + 0,749 \text{ PAD} - 0,648 \text{ DP} + e$$

Dari persamaan regresi di atas, maka dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta (α) sebesar -1,018 dengan tanda negative menyatakan bahwa apabila variabel bebasnya (X) dianggap konstan maka nilai Y adalah -1,018.
- b. Nilai koefisien regresi variabel PDRB (X1) adalah sebesar -9,838, dengan tanda negatif ini berarti apabila PDRB naik dan variabel bebas lainnya konstan, maka RKKD akan turun sebesar 9,838.
- c. Nilai koefisien regresi variabel PAD (X2) adalah sebesar 0,749 dengan tanda positif berarti mempunyai pengaruh yang positif. Jika PAD naik dan variabel bebas lainnya konstan, maka RKKD akan naik sebesar 0,749.
- d. Nilai koefisien regresi variabel DP (X3) adalah sebesar -0,648 dengan tanda negative. Hal ini berarti apabila DP naik dan variabel bebas lainnya konstan, maka RKKD akan turun sebesar 0,648.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) (Sujarweni (2015:164). Hasil perhitungan Koefisien Determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Koefisien Determinasi Setelah Transformasi Data

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.999 ^a	.999	.998	.00527	.999	943.019	3	4	.000	1.156

a. Predictors: (Constant), Ln_DP, PDRB, Ln_PAD

b. Dependent Variable: RKKD

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, diketahui bahwa nilai Koefisien Determinasi (Adjusted R^2) adalah sebesar 0,998. Hal ini berarti pengaruh ketiga variabel bebas tersebut terhadap variabel terikatnya sangat besar yaitu sebesar 99,8%. Sedangkan sisanya 0,2% merupakan variabel yang tidak atau belum diteliti.

F. Kebijakan Peningkatan

Untuk menentukan arah kebijakan peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah, maka perlu untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh signifikan dan berpengaruh positif. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa variable PDRB mempunyai pengaruh signifikan namun bernilai negative. Kemudian variabel PAD mempunyai pengaruh signifikan yang bernilai positif. Sedangkan variabel DP juga mempunyai pengaruh namun bernilai negatif. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah dapat dituangkan ke dalam tabel bantu model Indeks Kebijakan berikut ini :

Tabel 4.15
Tabel Bantu
Indeks Kebijakan

No	Hasil Signifikansi Regresi Berganda	Skala Prioritas	Kebijakan Prioritas	Program Utama
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	P.I	KP.I	PU.I
2	Dana Perimbangan (DP)	P.II	KP.II	PU.II
3.	Produk Domestik Regional Bruto	P.III	KP.III	PU.III

Dari tabel diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan variabel yang akan dijadikan Prioritas I. Kemudian variabel Dana Perimbangan akan dijadikan Prioritas II dan terakhir variabel PDRB akan dijadikan Prioritas III. Maka dari itu, Kebijakan Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah dapat difokuskan kepada PAD sebagai Prioritas I.

Berikut adalah Kebijakan Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah yang berfokus pada PAD :

1. Implementasi Undang-Undang PDRD terbaru kedalam Perda
2. Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran Pajak Daerah.
3. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Melakukan ekstensifikasi dan perluasan Pajak Daerah.
5. Meningkatkan pengelolaan Pajak Daerah.
6. Pengawasan dan pemungutan pajak yang efektif, efisien dan tepat sasaran.
7. Peningkatan penerimaan PAD yang bukan berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten terhadap pengelolaan Pajak Daerah.

Kebijakan peningkatan PAD diatas diikuti dengan program kegiatan yang dapat diterapkan sebagaimana berikut ini :

- 1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah yang mengacu pada kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - a. Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - b. Melakukan kajian ulang terhadap besaran tarif pajak untuk masing-masing Pajak Daerah.
 - c. Melakukan kajian terhadap model tarif pajak berjenjang yang disesuaikan dengan kemampuan, kondisi dan klasifikasi Wajib Pajak.
- 2) Pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah:
 - a. Melakukan pembaharuan terhadap kelas wilayah dan jalan untuk penetapan nilai sewa reklame.
 - b. Melakukan pembaharuan data PBB-P2 terhadap kondisi terkini dari Tanah dan Bangunan yang ada pada database masing-masing daerah.
 - c. Memperbaharui Peraturan terkait Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Pengoptimalisasian dalam pemungutan dan penagihan Pajak Daerah.
 - a. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, BUMD dan Badan Usaha lainnya dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.
 - c. Menyusun dan membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan PAD Lintas Sektor.

- 4) Pengidentifikasian Pajak Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II.
 - a. Menyusun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan UU No. 1/2022 yang memuat 7 jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 3. Pajak Alat Berat (PAB).
 4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 5. Pajak Air Permukaan (PAP).
 6. Pajak Rokok.
 7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)." (MLB)."
 - b. Menyusun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan UU No. 1/2022 yang memuat 7 jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kab/Kota, diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
 4. Pajak Reklame.
 5. Pajak Air Tanah (PAT).
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
 7. Pajak Sarang Burung Walet.
 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- 5) Sinergitas investasi kepada sektor-sektor serapan Pajak Daerah.
 - a. Memprioritaskan investor yang sektor usahanya dapat membentuk objek pajak daerah baru sehingga dapat meningkatkan Pajak Daerah

- b. Meningkatkan komitmen seluruh stakeholder melalui perjanjian tertulis atau M.o.U agar dapat terlaksananya strategi peningkatan PAD.
 - c. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder terkait untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
- 6) Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak daerah;
 - a. Mencanangkan dan mengkampanyekan Gerakan Sadar Pajak.
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan melalui media sosial.
- 7) Peningkatan peran sub sektor usaha;
 - a. Mendorong pelaku usaha yang pajaknya disetorkan ke Pemerintah Pusat untuk dapat berperan serta dalam meningkatkan PAD melalui peningkatan pemakaian lampu jalan, pemakaian hotel dan jasa boga katering untuk tenaga kerja, penyelenggaraan employee gathering, pembelian tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor dalam daerah.
- 8) Memperluas *tax-base* pajak daerah;
 - a. Melakukan pendataan terhadap wilayah yang belum banyak terdapat wajib pajak dan objek pajak.
 - b. Melakukan pendataan door to door dengan melibatkan unsur RT/RW setempat.
 - c. Melakukan kajian ulang terhadap nilai batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk Pajak Restoran
- 9) Menyelenggarakan sistem dan prosedur yang mempermudah pelayanan dan pengawasannya;
 - a. Menyelenggarakan sistem komputerisasi pengelolaan data base dan penerimaan pajak daerah.
 - b. Memperbanyak saluran atau jaringan pelayanan dan pembayaran pajak daerah dengan menyediakan saluran pelayanan sampai ke tingkat desa seperti Gerai Samsat, Samsat Keliling atau Layanan Drive Thru Pajak Daerah.

- c. Penerapan sistem aplikasi berbasis online dan mobile guna mempercepat pelaporan pajak daerah.
- 10) Menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam optimalisasi pengawasan dan penagihan Pajak Daerah;
- a. Menerapkan penggunaan produk Google Maps, Google Earth, Google Streetview dan Google Cloud yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan pengawasan pajak daerah
 - b. Menyelenggarakan kerja sama dengan aparat pemerintah setingkat RT/RW dalam rangka pengawasan dan pemungutan pajak daerah.
 - c. Menyelenggarakan kerja sama dengan importir, terminal, bandara dan pelabuhan terkait peredaran produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam memudahkan pendataan dan *tracing* wajib pajak.
- 11) Menyediakan sarana dan prasarana sistem pengawasan dan penerimaan pajak daerah yang terintegrasi dengan objek pajak;
- a. Mewajibkan setiap restoran untuk menggunakan tapping box dalam setiap transaksi pembayaran konsumen.
 - b. Melakukan integrasi sistem penerimaan pajak daerah ke dalam sistem transaksi penjualan pelaku usaha guna mendapatkan data yang akurat dan real-time.
 - c. Menyelenggarakan pengawasan CCTV berbasis teknologi Artificial Intelligence (A.I) yang mampu mendeteksi dan menghitung kendaraan untuk penerapannya terhadap pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Parkir.
- 12) Melakukan pengawasan secara internal baik terhadap pegawai pemerintah maupun pelaku usaha;
- a. Peningkatan pengawasan internal untuk pencegahan dan deteksi dini dari indikasi adanya penyalahgunaan atau penyimpangan pelaksanaan tugas.
 - b. Menyiapkan tim reaksi cepat dan menyediakan saluran whistle-blower khusus untuk kasus pajak daerah.

- 13) Pengoptimalan Lain-lain PAD yang sah dan dilaksanakan dengan mempedomani *Good Corporate Governance (GCG)*;
- a. Menyusun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan UU No. 1/2022 yang memuat 7 jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 3. Jasa giro;
 4. Pendapatan bunga;
 5. Tuntutan ganti rugi;
 6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 7. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- 14) Meningkatkan peredaran uang yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- a. Menyediakan bantuan pinjaman dengan skema khusus melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha guna meningkatkan pendapatan dan perputaran uang yang beredar.
 - b. Membentuk kawasan agropolitan dengan melengkapi kawasan pertanian dengan fasilitas perdagangan, perbelanjaan dan hiburan, distribusi serta pendukung komoditas pertanian.
- 15) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, reward dan punishment terhadap aparatur pengelolaan Pajak Daerah;
- a. Memberikan bimtek bagi aparatur yang sesuai bidang dan analisis jabatannya.
 - b. Memberikan reward dan promosi yang sesuai terhadap aparat maupun lembaga yang berhasil mencapai target penerimaan PAD.

- c. Memberikan punishment dengan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap aparat yang tidak disiplin, melalaikan tugas, pokok dan fungsinya dalam lembaga yang mengelola Pajak Daerah
- d. Melakukan peremajaan terhadap aparatur yang tidak kompeten dalam melakukan tupoksinya dan tidak mampu beradaptasi dengan teknologi terkini guna mencari terobosan baru dalam peningkatan PAD.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Kebijakan Peningkatannya di Provinsi Jambi (Studi kasus tahun 2010-2017) maka pada penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut:

5.1 KESIMPULAN

- a. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP).
- b. PDRB dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang negatif, yang artinya bahwa semakin tinggi nilai PDRB dan Dana Perimbangan maka Provinsi Jambi makin rendah Kemandirian Keuangan Daerahnya.
- c. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif, yang bermakna bahwa semakin tinggi nilai PAD maka akan semakin tinggi pula Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

5.2 SARAN

- a. Untuk akademisi agar dapat melakukan penelitian dengan variabel lain atau data lainnya yang terkait dengan Kemandirian Keuangan Daerah dan Kebijakan Peningkatannya.
- b. Untuk praktisi agar dapat menjadikan Kebijakan Peningkatan PAD diatas sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja milik Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy, Abdul Halim, 2006, *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2, November.
- Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya, 2011, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). Financial independence of regencies and cities in Central Java. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 199–209. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art9>
- Ghozali, Imam. (2009). *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- HAW. Widjaja. (2009). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kuswandi, Aos. 2016. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA)
- Mahmudi. (2011), *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : PT Erlangga
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Riduansyah, Mohammad. 2003, *Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2, Desember 2003, Pusat Pengembangan dan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16425, Indonesia.
- Royda, R., & Riana, D. 2019. *Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

- Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 50.
- Soebagiyo, Daryono. 2007, *Kausalitas Granger PDRB Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Dati I Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 2, Desember 2007, hal. 177 – 192. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Suci, Cahaya Stannia dan Asmara, Alla. 2014. *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Vol 3 No 1. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Sujarweni, Wiratna. Belajar Mudah SPSS untuk Penelitian dan Umum. Yogyakarta: Ardana Media. 2008.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Suliyanto. 2011. EKONOMETRIKA TERAPAN: Teori & Aplikasi dengan SPSS. Edisi Pertama. Andi Offset. Yogyakarta.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana*. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2(2), 98-114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>